

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

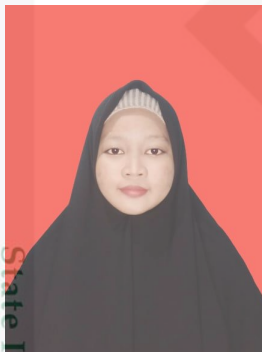
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

ENDANG MURDIANI

NIM.01970623319



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: ENDANG MURDIANI
 : 01970623319
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : VII (TUJUH)
 : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN (PBB) DI KANTOR BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PELALAWAN

Pekanbaru, 3 Januari 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP.198208062006042002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. H. Mulyani, SE, MM
 NIP.197008261999032001

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A
 NIP.197909112011011003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Endang-Undang

NAMA :
 NIM :
 PRODI :
 FAKULTAS :
 SEMESTER :
 JUDUL :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ENDANG MURDIANI
NIM : 01970623319
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ABUPATEN PELALAWAN
TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP:197609102009012003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S. SI, M.Stat

NIP:198807182020122018

Penguji I

Ari Nurwahida, SE, MM

NIP:197801052007102002

Penguji II

Rony Jaya, S. Sos, M. Si

NIP:130717060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Murdiani
 NIM : 01970623319
 Tempat/Tgl. Lahir : Sp. Langgam / 04-Juli-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : DIII Administrasi Persewaan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
dikantor badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah
Kabupaten pelalawan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2022
 Surat pernyataan

Endang Murdiani
 NIM : 01970623319



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

ENDANG MURDIANI

NIM.01970623319

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah. Pentingnya pajak ini untuk pembangunan serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka peran masyarakat sangatlah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tugas Akhir ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Tugas akhir ini memiliki hasil bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang dihadapi di antaranya Faktor ekonomi sehingga minimnya kemampuan membayar pajak tepat waktu. Adanya pemindahan hak milik sehingga susah untuk menjumpai wajib pajak nya

Kata Kunci: Prosedur, pemungutan, PBB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ENDANG MURDIANI

NIM.01970623319

Land and Building Tax is a type of tax whose amount of tax owed is determined by the government. The importance of this tax is for development as well as the improvement of the prosperity and welfare of the people. So the role of the community is very important in fulfilling tax obligations by encouraging awareness and understanding that taxes are the main source of state financing and national development. This Final Project aims to find out how the procedure for collecting Land and Building Tax in Pelalawan Regency. The method used for this research is a qualitative descriptive method, a data collection technique used through interviews. This final project has the result that the procedure for collecting land and building taxes is based on the imposition of the Selling Value of Tax Objects (NJOP). In its implementation, there must be obstacles faced, including economic factors so that the lack of ability to pay taxes on time. There is a transfer of property rights so that it is difficult to find the taxpayer.

Keywords: Procedure, Collection, Land and Bulding Tax



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis tidak luput dari berbagai kesalahan dan hambatan, namun atas semangat dan keyakinan diri saya, dan juga bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar ahli madya (A.md) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Rasa terimakasih yang tulus saya ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Amat Basiran dan Ibu Mujiasih terimakasih karena telah memberikan semangat dan dukungan untuk bertahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga penulis dapat menjadi kebanggaan serta tetap jadi anak yang berbakti.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni,SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar,M.Hum, Ibu Dr.Hj.Julina,SE,M.Si, selaku Wakil Dekan I, Wakil dekan II, dan Wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal,S.HI.,M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
6. Bapak Muslim,S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
7. Bapak Dr.Muhammad April, S.H, M.Hum selaku pembimbing akademik.
8. Ibu Sahwitri Triandani,SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat,motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga.
10. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pelalawan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada semua rekan-rekan lokal B 2019 yang memberikan dukungan dan doa.

Tugas Akhir ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, penulis sadari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna . Oleh karena itu, penulis sangat menghargai keritikan dan saran yang membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Aamiin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikaum wa rahmatullahi wa barakatu.

Pekanbaru 2022

Penulis,

Endang Murdiani
NIM.01970623319

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penulisan	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian	7
1.5.2 Waktu Penelitian.....	7
1.5.3 Jenis Data.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5 Analisis data	8
1.5.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	10
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	12
2.3 Struktur Organisasi.....	14
2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.....	15
2.5 Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	19
3.1.1 Pengertian prosedur.....	19
3.1.2 Pengertian Pajak	20
3.1.3 Fungsi Pajak	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Syarat Pemungutan Pajak	21
3.1.5	Asas Pemungutan Pajak.....	22
3.1.6	Pengelompokan Pajak.....	23
3.1.7	Pajak Daerah.....	24
3.1.8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26
3.1.9	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	28
3.1.10	Objek Pajak.....	28
3.1.11	Subjek Pajak	29
3.1.12	Syarat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32
3.1.13	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33
3.1.14	Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah pemungutan PBB	33
3.1.15	Pra Panedaftaran PBB	34
3.1.16	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BPKAD Kabupaten Pelalawan.....	36
3.1.17	Pajak Menurut Islam.....	39
3.2	Praktek.....	43
3.2.1	Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	43
3.2.2	Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.....	49
3.2.3	Kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten pelalawan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	51
3.2.4	Perbandingan antara Teori dan Praktek.....	52

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran	55

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Wajib Pajak Kabupaten Pelalawan	4
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupetan Pelalawan	4
Tabel 3. 1 perbandingan teori dan praktek.....	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	14
Gambar 3. 1 Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.....	48
Gambar 3. 2 mekanisme pembayaran PBB.....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembangunan di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak ialah iuran wajib yang diberikan negara kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan umum. Di Indonesia pajak merupakan pendapatan negara yang menyumbang paling besar, lebih dari 80% dari total pendapatan. Besar kecilnya pajak yang diterima sangat berpengaruh terhadap pembangunan negara.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang manjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menjadikan pajak sebagai kewajiban negara dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara sangatlah penting. Berdasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 telah melakukan perubahan mendasar mengenai pengaturan dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Dalam Otonomi Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri tujuannya untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, untuk memantau penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Ada beberapa jenis pajak yang menyumbang dana untuk pembangunan negara salah satunya adalah pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. Apabila didefinisikan lebih detail, yang dimaksud dengan pajak bumi adalah pengenaan pajak atas lahan, perairan pedalaman serta laut. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan tersebut. Pajak ini akan muncul ketika adanya keuntungan ekonomi yang didapat para pemilik bangunan. Dasar hukumnya adalah Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang awalnya jenis pajak pusat yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan pusat kini menjadi pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Peralihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan otonomi daerah dan sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saat ini di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak: yang pertama, *Official Assessment System* pada sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak hanya perlu menunggu penyampaian hutang pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, *Self Assessment System* pada sistem pemungutan pajak ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada pemerintah. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem pemungutan ini. Yang ketiga, *With Holding System* pada sistem pemungutan ini disebut juga dengan pajak potong pungut, karena pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang dengan menerbitkan bukti potong atau bukti pungut bagi wajib pajak yang sudah melunasi pajak yang terutang. Pemotongan penghasilan oleh bendaharawan instansi dilampirkan bersama SPT PPH/SPT PPN.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah. Pentingnya pajak ini untuk pembangunan serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka peran masyarakat sangatlah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan data Objek maupun Wajib pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terutang (SPPT) harus terlayani dengan baik sehingga mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Wajib Pajak Kabupaten Pelalawan

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP yang Bayar	Jumlah WP yang Tidak Bayar
2019	79,580,00	52,352,00	16,748,00
2020	80,688,00	56,627,00	24,061,00
2021	94,209,00	64,441,00	29,768,00
2022	119,875,00	71,636,00	48,239,00

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

Untuk mengetahui jumlah prolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten pelalawan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupetan Pelalawan

Tahun	Target	Realisasi
2019	16,930.029,040,00	15,068,844,967,00
2020	20,577,979,850,00	17,337,925,552,00
2021	22,576,583,292,00	19,681,047,827,00
2022	26,264,212,429,00	22,802,804,747,00

Sumber :Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan (2022)

Berdasarkan hasil dari wawancara salah satu permasalahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan masih belum validnya data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib Pajak, disebabkan karena adanya pemindahan hak milik tanpa ada konfirmasi kepada petugas yang ada di desa/kelurahan setempat sehingga sulit untuk menemukan Wajib Pajaknya (BPKAD kabupaten Pelalawan). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin memfokuskan dengan mengambil judul **“Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pelalawan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan pajak Bumi dan Bangunan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pelalawan?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten pelalawan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi penulis :

Menambah wawasan tentang pajak bumi dan bangunan bagaimana prosedur pemungutannya, upaya meningkatkan pendapatan, dan apa saja kendalanya.

2. Manfaat bagi pembaca :

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber wawasan tentang pajak bumi dan bangunan, bermanfaat juga sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang pajak bumi dan bangunan bagi mahasiswa yang akan datang.

3. Manfaat bagi akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, beralamat di Jl. Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022-November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langgung dari sumber pertama. Sugiyono (2018)

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Danang Sunyot (2013)

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Moelong (2012) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, pewawancara dan terwawancara. Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan kasubag atau staf untuk mendapatkan informasi tentang Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dikabupaten pelalawan.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan catatan-catatan, tugas, fungsi, dan serta data mengenai tujuan yang berkaitan dengan Peroses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten pelalawan.

c. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

1.5.4. Analisis data

Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas.

1.5.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan Tugas Akhir ini, penulis susun kedalam empat bab seperti uraian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat kantor BPKAD Kabupaten Pelalawan, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di BPKAD Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang mungkin bermanfaat dan diperlukan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum untuk menunjang unsur keuangan. Sebagaimana pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta diperjelas melalui pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewajiban yang meliputi:

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat.
3. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantu.

BPKAD Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pelalawan. Dalam perjalanannya susunan Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Inovasi menuju Pelalawan EMAS(Ekonomi,Mandiri,Aman dan Sejahtera.

2. Misi

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Unggul,Beriman,Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.
- b) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
- c) Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
- d) Meningkatkan Pembangunan Istruktur.
- e) Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
- f) Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.
- g) Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan mencapai misi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dijelaskan diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tujuan sebagai berikut:

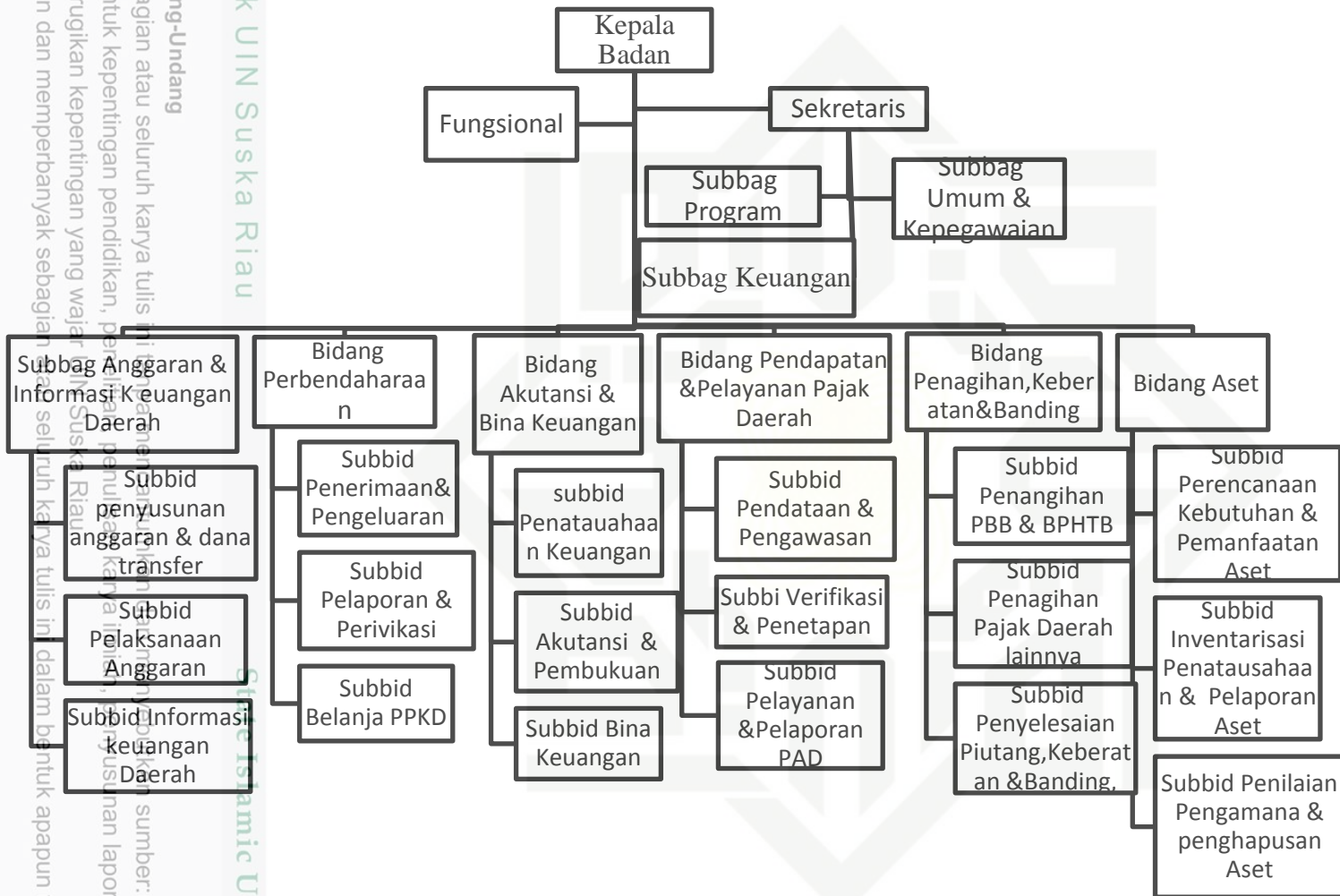
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara bersinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan



Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawa (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

1. Tugas

BPKAD Kabupaten Pelalawan Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.

a) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membentuk Bupati, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan

b) Sekretaris

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan perencanaan serta evaluasi pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian, dan membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- i. Subbag Program
- ii. Subbag Keuangan
- iii. Subbag Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, memfasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD, melakukan pembinaan dan evaluasi rancangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran kabupaten. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah membawahi 3 sub bidang ,yaitu:

- i. Subbid Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer
 - ii. Subbid Pelaksanaan Anggaran
 - iii. Subbid Informasi Keuangan Daerah
- d) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penerimaan, pengeluaran, verifikasi, pelaporan dan belanja PPKD.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

- i. Subbid penerimaan dan pengeluaran
 - ii. Subbid verifikasi dan pelaporan
 - iii. Subbid belanja PPKD
- e) Bidang Akutansi dan Bina Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada penatausahaan keuangan, akutansi dan pembukuan dan bina keuangan. Membawahi 3 (tiga) subbid yaitu:

- i. Subbid Penatausahaan Keuangan
- ii. Subbid Akutansi dan Pembukuan
- iii. Subbid Bina Keuangan.

2. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pelalawan adalah:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- d) Pelaksanaan kesekretariatan badan dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi BPKAD tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) BPKAD yang membuat program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala daerah. Penjabaran program kerja operasional dalam bentuk kegiatan yang disusun secara tahunan simuat dalam Rencana Kerja (RENJA) BPKAD. Renja tersebut juga menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

2.5. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten pelalawan terletak di pesisir timur Pulau Sumatra antara 1,25’ lintang Utara sampai dengan 0,20’ Lintang Selatan dan antara 100,42’ Bujur Timur sampai dengan 103,28’ Bujur Timur.

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Luas Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423,984 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19,355 Ha. Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 390.046,00 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 399.264.00 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 422.907.00 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten pelalawan. Maka penulis memberikan beberapa kesimpulan. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BPKAD Kabupaten Pelalawan: melakukan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak. Pemungutannya dilakukan berdasarkan pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Menerbitkan SPPT PBB pada awal tahun masa pajak secara massal kepada wajib pajak atau badan, setiap wajib pajak atau badan harus mengisi SPPT dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu. Wajib pajak yang terlambat mengembalikan SPPT atau mengembalikan SPPT tepat waktu yang ditentukan namun pengisiannya tidak benar, maka wajib pajak dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank seperti Bank Mandiri, Bank Riau Kepri, BRI, dan sekarang juga sudah bekerja sama dengan bank BNI. Pembayaran bisa juga melalui petugas yang ada di setiap desa yang nantinya uang akan disetor melalui transfer bank atau mendatangi Kantor Pajak Daerah setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan diantaranya: melakukan sosialisasi akan pentingnya pajak, melakukan pendataan rutin mengenai subjek dan objek PBB, memberika teguran dan sanksi kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan.
- 3) Ada beberapa kendala yang saat ini masih menjadi kendala yang dihadapi BPKAD dalam pengambilan pajak, yaitu: Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena ekonomi juga sebagai faktor masyarakat tidak membayar pajak dan tidak tepat waktu, Adanya pemindahan hak milik sehingga susah untuk menjumpai wajib pajak nya.

4.2. Saran

1. Untuk BPKAD sebaiknya melakukan pendataan berkala agar mengurangi ketidak jelasan subjek nya.
2. Untuk wajib pajak, diharapkan meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, dibutuhkan masukan yang positif kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan cara mengikuti seminar perpajakan.
3. Wajib pajak diharapkan memberikan data-data atau dokumen yang benar untuk mendukung perhitungan PBB agar berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2008). *Dasar- Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- (2018). *Perpajakan* . Yogyakarta: ANDI.
- Pahala, S. M. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi (2010) *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*. Yogyakarta: Andi.
- <http://bpkad.pelalawankab.go.id/index.php/?halaman/sejarah> pada 6 juli 2021
- <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltex/1994/12TAHUN-1994UU.htm> pada 6 juli 2021
- <http://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan dan implementasi sistem informasi urunan desa (URDES) berdasarkan pada pajak bumi dan bangunan. *Jurnal CompuTech & Bisnis*, 9(2), 95-107. (1 november 2022)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Banguna
- Anggoro Damas Dwi . (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- <https://kbbi.web.id/prosedur>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/pmk.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran,dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- Widodo, W. A. (2010). *Pajak Bumi & Bangunan Untuk Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Madia.
- <http://sipn.menpan.go.id/pelayanan-publik/riau/kabupaten-pelalawan/badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah/pelayanan-pajak-pbb-p2> pada 2 januari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1842/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 22 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

Kepada
Yth. Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Endang Murdiani
NIM. : 01970623319
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pelalawan"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1864/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 23 Maret 2022 M
19 Sya'ban 1443 H

Kepada
Yth. **Sahwitri Triandani, SE, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Endang Murdiani
NIM : 01970623319
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pelalawan "**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
 Telp./Fax. (0761) 493776 - PANGKALAN KERINCI
 Email : bpkad.pelalawankab@gmail.com

Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 16 Desember 2022

Nomor : 800/BPKAD/2022/5552
 Lampiran : -
 Perihal : Tanggapan Atas Penelitian
 di BPKAD Kab. Pelalawan

Kepada :
 Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
 Ilmu Sosial
 UIN SUSKA RIAU
 di - Pekanbaru

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 503/ DPMPSTP/ NON IZIN-RISET/46403, tanggal 22 Juni 2022, perihal Permohonan Bantuan Penelitian atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : ENDANG MURDIANI
 NPM : 1970623319
 Program Studi : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
 Di Kabupaten pelalawan BPKAD Kabupaten pelalawan.

Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diberikan izin untuk memperoleh bahan/data/informasi sebagai keperluan penelitian penyelesaian penulisan skripsi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KAB. PELALAWAN

DEVITSON SAHARUDDIN, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721203 200012 1 004